

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Serikat Pekerja Rumahan dan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan

A Homeworker Union and the Fulfillment of Homeworker Rights

Penulis

Devy Dhian Cahyati dan Bellicia Angelica Tanvil

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Cahyati, D.D., dan Tanvil, B.A., 2020. Serikat Pekerja Rumahan dan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan, [Homeworker Unions and the Fulfillment of Homeworker Rights]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 210-235. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Cahyati, D.D., and Tanvil, B.A., 2020. Serikat Pekerja Rumahan dan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan, [Homeworker Unions and the Fulfillment of Homeworker Rights]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 210-235. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini menjelaskan upaya perempuan pekerja rumahan dalam memperbaiki kondisi kerja mereka dan mengakses hak-hak sebagai pekerja di sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perempuan di desa ini menghadapi persoalan ekonomi karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan. Di tengah kesulitan ini, banyak perempuan memutuskan untuk menjadi pekerja rumahan meskipun upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan usaha dan modal yang mereka keluarkan. Di desa ini, terdapat tiga bidang pekerja rumahan, yaitu penganyam panggangan ikan, pembungkus sedotan air mineral dan pengepak dupa. Para perempuan pekerja rumahan kurang memiliki kesadaran diri sebagai seorang pekerja, apalagi sebagai pekerja yang layak untuk mendapatkan hak-hak pekerja. Selain itu, perempuan juga tidak mendapatkan peran penting di tingkat desa, khususnya terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan desa. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk dapat memengaruhi kebijakan yang terkait dengan hak mereka sebagai pekerja rumahan. Persoalan yang membelenggu perempuan perlahan mulai berkurang setelah kehadiran Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) yang secara intensif mendampingi para perempuan pekerja rumahan, untuk dapat berdaya secara individual maupun secara kolektif

Upaya memberikan kesadaran pada perempuan pekerja rumahan tentang hak-haknya menjadi langkah awal bagi BITRA untuk mendukung pengorganisasian pekerja rumahan. Mereka melakukan ini dengan cara, membentuk kelompok pekerja rumahan di bidang penganyam panggangan ikan pada tahun 2015. Pembentukan kelompok ini diikuti dengan kongres di tingkat provinsi untuk pembentukan Serikat Pekerja Rumahan (SPR)-Sejahtera. Secara struktural, SPR Sejahtera terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten, dan Pimpinan Kelompok Tingkat Desa/Kelurahan (PKTD/PKTK). Untuk meningkatkan kapasitas perempuan pekerja rumahan, dibentuklah Sekolah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR). Selain itu, BITRA juga mendorong pekerja rumahan untuk membentuk unit usaha mandiri sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Lebih jauh lagi, pekerja rumahan membentuk Credit Union (CU) sebagai usaha simpan pinjam bagi pekerja rumahan, agar mereka tidak lagi dieksploitasi oleh rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi.

Gerakan kolektif pekerja rumahan yang dimotori oleh SPR Sejahtera berhasil membawa perubahan penting bagi perempuan pekerja rumahan, baik di level individu, komunitas maupun institusional. Di level individu, telah muncul kesadaran pekerja rumahan akan hak-haknya, serta berlangsungnya peningkatan kapasitas pengetahuan, kemampuan berbicara di depan publik dan kemampuan perempuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Di level komunitas, perempuan pekerja rumahan secara kolektif memiliki daya tawar yang cukup bagus ketika berinteraksi dengan pemerintah desa. Saat ini pekerja rumahan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah desa untuk menjadi Kader Posyandu dan membantu pembuatan BPJS Kesehatan bagi warga desa.

Di level institusional, ada beberapa capaian penting yang sudah didapatkan oleh SPR-Sejahtera. Pertama, pencatatan SPR-Sejahtera di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara. Kedua, mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pekerja Rumahan. Dalam mendorong Raperda ini, SPR-Sejahtera mendapat dukungan dari serikat-serikat buruh di Sumatera Utara. Sampai saat ini, proses ratifikasi Raperda tersebut masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan, karena tidak adanya payung hukum yang lebih tinggi yang mengatur tentang pekerja rumahan di tingkat nasional. Ketiga, kemampuan mengakses program kesejahteraan pemerintah dan masuk dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Semua capaian ini mendukung penguatan institusional hak para perempuan pekerja rumahan, yang sebelumnya kesulitan mengakses program kesejahteraan dan asuransi kerja, karena keberadaan mereka yang sebelumnya tidak diakui.

Summary

This case study examines women homemaker efforts to improve work conditions and guarantee homeworkers' rights in Deli Serdang district, North Sumatra. Women in this research village face economic challenges due to limited employment opportunities. As homeworkers, many women receive low wages, which are sometimes not enough to compensate for their time and investment. Homeworkers in the Deli Serdang research village are mainly employed in three sectors: fish grill weaving, mineral water straw wrappers, and incense packers.

Before the support of the Indonesian Foundation for Rural Capacity Building (*Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia* – BITRA), many women homeworkers did not consider their status as workers and rights to fair wages, treatment and protection. Women homeworkers also did not participate in village-level decision making forums, through which they can influence policies that acknowledge and protect their rights as homeworkers.

As a first step to bolster workers' solidarity, BITRA provided educational training to women homeworkers about their rights as workers. Following these training programs, women weavers formed a homeworkers group in 2015. This group was then officially recognised as the Prosperous Homeworkers Union (Serikat Pekerja Rumahan – Sejahtera – SPR) by BITRA's provincial level congress.

Structurally, the SPR Sejahtera consists of the Regional Deliberative Council at the provincial level, the Branch Representative Council at the district level, and village and hamlet level groups. To further increase the capacity of women homeworkers, SPR Sejahtera formed the School for the Capacity of Women Homeworkers (SPPR) through which BITRA has also encouraged homeworkers to form independent businesses to diversify the local economy, and has helped them develop economic independence. Further a Credit Union was established for homeworkers to prevent them being exploited by loan sharks who charge exorbitant interest on loans.

The collective movement of women homeworkers which SPR Sejahtera leads has succeeded in effecting important changes at individual, community, and institutional levels. For individual members, women have learned their rights as workers, honed their public speaking skills and increased their ability to start and manage small businesses. At the community level, women homeworkers have increased their bargaining power and good relations with the village government. The SPR has also gained the trust of the village government and its members have been appointed to positions in the village Posyandu (maternal and child health group) and to assist community members in accessing government health insurance.

SPR-Sejahtera has also led important changes at the institutional level and has been recognised by the Office of Manpower of North Sumatra. The Union also played an instrumental role in the formulation and drafting of District Regulation to protect homeworkers, with the support of trade unions across North Sumatra. To date, challenges remain in garnering the support to ratify this draft District Regulation, as there is no higher legal basis for homeworker protection at the national level. Nevertheless, the Union has enabled women and communities to access government welfare programs and was recognised in the District Head's Integrated Referral Service System regulation (Sistem Layanan Rujukan Terpadu - SLRT). All these changes have helped to provide institutional support for female homeworkers who were previously unable to access such welfare support and insurance as their work was not recognised.

Pendahuluan

Studi kasus ini menjelaskan tentang pekerja rumahan di desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam upaya pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja.¹ Keberadaan pekerja rumahan di desa ini telah ada sejak 40 tahun lalu dan dilakukan secara turun menurun.² Perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumahan menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi internal keluarga, pemerintah desa, perusahaan maupun pemerintah kabupaten. Hal ini dikarenakan keberadaan pekerja rumahan belum diakui oleh negara melalui regulasi khusus. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pekerja rumahan, meskipun ada aturan turunan di tingkat Menteri yang menyebutkan pekerja rumahan. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia saat ini belum meratifikasi konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang kerja rumahan.

Isu pekerja rumahan tidak hanya terbatas pada lingkup desa, namun juga terkait dengan konteks yang lebih luas di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengeksplorasi tidak hanya di tingkat desa, tetapi juga bagaimana pekerja rumahan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera bekerja di level kabupaten, provinsi sampai level nasional. Studi kasus ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian *pertama* menjelaskan tentang konteks pekerjaan rumahan di wilayah Sumatera Utara dan secara khusus di desa penelitian ini. Bagian *kedua* menguraikan permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja rumahan di level terkecil yakni keluarga, maupun di level tinggi yang mencakup pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. Bagian *ketiga* menjabarkan tentang kelompok perempuan pekerja rumahan yang didampingi oleh Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) dalam berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, terutama dengan membentuk SPR-Sejahtera sebagai kendaraan untuk mengakses hak-hak pekerja rumahan. Bagian *keempat* memaparkan strategi bagaimana perempuan pekerja rumahan yang tergabung ke dalam SPR-Sejahtera menciptakan perubahan, baik secara individual, kolektif dan institusional. Setelah didampingi oleh BITRA, pekerja rumahan saat ini mengalami peningkatan kapasitas, memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi dan memiliki jejaring yang lebih luas baik dengan pemerintah, akademisi, maupun serikat buruh lain.

“Kami ikut banyak macam pelatihan-pelatihan, itu membikin kita lebih berani untuk ke depan. Waktu sebelumnya dulu, perkenalan satu-satu namanya, di depan ini orang banyak aja nyebutkan nama aja salah, sekarang udah nggak, biasa aja nengok muka orang.” (Mila, Ketua Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

1. Pekerja Rumahan di Sumatera Utara: Sebuah Pengantar

Pekerja rumahan di Sumatera Utara tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat. Secara umum, pekerja rumahan bekerja di beberapa sektor, di antaranya yaitu pengolahan makanan, minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, pengolahan kayu, dan sektor manufaktur lain (Allen, dkk, 2015, 28). Di Sumatera Utara, pekerja rumah bekerja di beragam bidang usaha, yaitu: pembungkus sedotan air mineral, penganyam kawat panggangan, pembungkus kacang lotre, pembungkus dupa, pengupas pinang, penjahit jok bayi, penggunting cabai, penggunting bawang, penjahit sarung bantal, pengupas udang, pembungkus sendok es krim, dll.³ Pekerja rumahan memiliki karakteristik utama yakni tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat pada umumnya; pemahaman tentang kesetaraan gender yang terbatas; dan biasanya adalah ibu rumah tangga yang sudah menikah dan para suami mereka memiliki pekerjaan lepas atau jangka pendek di bidang pekerjaan dengan keterampilan rendah atau tidak memerlukan keterampilan sama sekali (Allen, dkk, 2015, 2).

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

² Berdasarkan diskusi kelompok dengan staf-staf BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

³ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

Dalam Konvensi ILO No. 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan (ILO, 1996, 6) disebutkan bahwa kerja rumahan adalah “pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional”. Pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (disebut pekerja rumahan) dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan, seringkali melalui perantara (ILO, 1996, 6).

Pekerja rumahan berbeda dengan pekerja rumah mandiri. Pekerja berbasis rumahan bersifat mandiri dan menanggung seluruh risiko sebagai operator mandiri. Pekerja yang masuk dalam kategori ini adalah pekerja yang membeli bahan baku sendiri, menyediakan peralatan, membayar biaya utilitas, transportasi dan menjual produknya secara mandiri (Allen, dkk, 2015, 10). Sementara itu, pekerja rumahan biasanya dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan yang seringkali menggunakan perantara.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan tersebut, sehingga belum ada kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja rumahan. Hal ini juga membawa konsekuensi bagi upaya pembuatan kebijakan di daerah, misalnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, yang akan dibahas secara lebih detail dalam sub-bab empat tulisan ini. Dengan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pekerja rumahan, sampai saat ini pekerja rumahan masih dianggap bukan pekerja, dan karenanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.

Kesulitan untuk mendapatkan hak-hak pekerja rumahan juga dialami oleh warga di sebuah desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Desa ini memiliki luas 6 km² dengan jumlah penduduk 4.219 jiwa, terdiri dari 2.153 laki-laki dan 2.066 perempuan. Desa ini berlokasi sekitar 4 km dari jalan tol Medan-Kualanamu, dan terbagi menjadi 4 dusun, dengan sebutan Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV.

Secara kultural, desa ini merupakan desa multi etnis. Suku mayoritas yaitu suku Jawa dengan persentase 51%. Suku lain yaitu Batak (23,44%), Kerinci (14,27%), Melayu (8,32%), Minang (1,61%) dan Aceh (1,36%) (Pemerintah Desa, 2019). Berdasarkan keterangan dari Sekretaris SPR Sejahtera, nenek moyang penduduk desa ini berasal dari Suku Kerinci Jambi.⁴ Pada masa lalu, orang-orang Kerinci datang ke wilayah ini lalu beranak pinak. Mereka mencoba menjaga keturunan mereka dengan cara menikah dengan sesama orang Kerinci agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga.⁵ Akibatnya, struktur demografis kultural desa ini berciri hubungan kekeluargaan yang tinggi.⁶ Secara keagamaan, desa ini didominasi oleh penganut agama Islam (78%). Agama lain yang dianut masyarakat antara lain Kristen Protestan (14%), Katolik (0,6%), Hindu (0,1%) dan Budha (0,1%).

Lebih dari separuh penduduk desa bekerja di sektor jasa, yaitu sejumlah 2.165 jiwa. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini karena mereka bekerja untuk perusahaan. Sementara penduduk yang lain bekerja di sektor perdagangan sejumlah 75 jiwa, 60 jiwa bekerja di sektor angkutan, 54 jiwa bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, dan yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 25 jiwa (Pemerintah Desa, 2019).

Di desa ini terdapat 8 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, i di antaranya yaitu Perusahaan Asia Raya Foundry (bidang logam), PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (ternak ayam), Tanjung Timberindo (kayu), Atmindro (perakit mesin kelapa sawit), dan SMS (perusahaan makanan ringan). Perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki

⁴ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

⁵ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

⁶ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

oleh individu. Tidak semua warga desa dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Alif yang menjabat sebagai kepala desa, kapasitas sumber daya manusia (SDM) warga desa masih rendah dan membuat mereka tidak memiliki kualifikasi untuk terserap di lapangan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penyebab rendahnya pendidikan, menurut Alif, adalah adanya pengaruh lingkungan, misalnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di warnet dan maraknya penggunaan narkoba.⁷ Di sisi lain, masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah desa karena tidak diberi pekerjaan, padahal hal tersebut disebabkan oleh hilangnya kepercayaan perusahaan pada kualitas SDM warga desa.⁸ Selain membuka peluang lapangan pekerjaan, keberadaan perusahaan-perusahaan di desa ini di sisi lain memunculkan dampak negatif untuk masyarakat. *Pertama*, karena banyaknya perusahaan di desa, truk-truk berlalu lalang di jalanan desa sehingga memunculkan debu. *Kedua*, keberadaan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Dusun I menyebabkan munculnya hama lalat (medanbisnisdaily.com, 2014) yang mengganggu kesehatan warga setempat. Diana menceritakan bahwa adanya peternakan ayam menyebabkan lalat-lalat berkeliaran sampai ke dalam rumah.⁹

Karena tidak terserap bekerja di pabrik milik perusahaan yang ada di sekitar desa, sebagian penduduk bekerja sebagai pekerja rumahan dalam bidang pengepakan dupa, pembungkusan sedotan air mineral dan pembuatan panggangan ikan. Para pekerja rumahan ini biasanya adalah perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Di desa ini, hampir setiap dusun memiliki pekerjaan rumahan dalam tiga bidang, yaitu pembuatan panggangan ikan, pengepakan sedotan, dan pengepakan dupa.

A. Bidang pembuatan panggangan ikan

Pekerja rumahan yang bekerja di bidang pembuatan panggangan ikan terpusat di dusun IV. Pekerjaan membuat panggangan ikan sudah dilakukan secara turun temurun di desa ini.¹⁰ Dalam ingatan Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, pekerjaan membuat panggangan ikan sudah dilakukan sejak tahun 2002, sebagaimana yang ia tuturkan berikut ini:

"Itu sekitar tahun 2002 ya kak ada kawat ini, di bukaan pertama perusahaan kawatnya itu kan 2002, jadi kami tu dulu ya gitu. Oh ada apa ini bantu-bantu ekonomi suami gitu kan, itulah terus kami ambil kawatnya. Siapa yang mau nganyam itulah baru pertama kali kami tahun 2002-lah kami jadi penganyam kawat. Gajinya waktu itu masih, satu kodi itu yang kecil Rp1.400,00." (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019)

Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai pembuat panggangan ikan melalui tauke (perantara) yang berkeliling menawarkan pekerjaan. Melalui tauke-lah, pekerja rumahan mendapatkan bahan baku berupa kawat, sekaligus menyetor hasil pekerjaan mereka kepada tauke ini. Sistem perantara ini membuat para pekerja rumahan tidak mengetahui secara persis siapa pengusaha yang memberi mereka pekerjaan. Para pekerja hanya mendapatkan bahan berupa kawat, sementara alat untuk menganyam seperti tang dan martil harus disediakan sendiri oleh pekerja. Mereka membuat panggangan ikan dalam berbagai ukuran dan jumlah unit, yang akan berimplikasi pada jumlah upah yang mereka terima. Upah yang diterima oleh pekerja rumahan yaitu Rp1.400,00 untuk ukuran kecil dan Rp1.800,00 untuk pemanggang dengan kawat ukuran besar. Pekerjaan membuat panggangan ikan bersifat fleksibel, dan tidak selalu dilakukan setiap hari. Terkadang pekerja rumahan melakukan pekerjaan lain, yaitu memotong pinang. Menurut keterangan Bu Mia, pekerjaan memotong pinang membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena menggunakan alat yang tajam ketika memotong-motong pinang, agar tidak terjadi kecelakaan kerja.¹¹ Pada tahun 2014, pekerja rumahan pembuat panggangan ikan ini membentuk kelompok yang terdiri dari 38 orang.

⁷ Wawancara Alif, Kepala Desa, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

⁸ Wawancara Alif, Kepala Desa, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

⁹ Wawancara Diana, Ketua Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

¹⁰ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

¹¹ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

B. Bidang pembungkusan sedotan air minum kemasan

Pekerja rumahan yang bekerja dalam bidang pembungkusan sedotan (orang desa menyebutnya dengan “pipet”) air mineral kemasan terpusat di dusun I. Pekerja rumahan melakukan pembungkusan sedotan ke dalam plastik kecil, dan merekatkannya dengan menggunakan atau dengan cara menyeterika ujung plastik. Pada tahun 2015, perempuan di dusun I yang bekerja sebagai pembungkus sedotan membentuk kelompok yang saat ini anggotanya mencapai 50 orang. Sebagian besar pekerja rumahan merupakan ibu rumah tangga. Mereka ikut bekerja membungkus sedotan untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan penghasilan tambahan.¹² Untuk 1 karung sedotan, mereka membutuhkan 1-2 hari untuk menyelesaikan pekerjaan pengepakan. Dalam waktu satu bulan, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan ini sekitar 5 karung.¹³ Pekerja rumahan mendapatkan upah sebesar Rp8000,00 per karung. Seringkali mereka menyelesaikan pekerjaan ini dengan melibatkan semua anggota keluarga. Selain itu, pekerja rumahan harus mengeluarkan modal sendiri untuk dapat mengelem bungkus sedotan, seperti lilin, setrika dan biaya listrik yang menyertai pekerjaan mereka.¹⁴ Pekerja rumahan tidak secara langsung berhubungan dengan perusahaan karena perusahaan menunjuk satu koordinator lapangan. Koordinator lapangan adalah orang yang bertugas membagikan sedotan, mengumpulkan kembali, lalu menyeter ke perusahaan.¹⁵

C. Bidang Pengepakan Dupa

Pekerja rumahan yang bermata pencaharian dalam bidang pengepakan dupa banyak berada di Dusun II. Di dusun ini, terdapat satu kelompok pengepak dupa yang beranggotakan 37 orang. Untuk satu kardus dupa, pekerja rumahan mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00.¹⁶ Meskipun mendapatkan upah yang lebih besar dibanding dengan pekerja rumahan pembuat panggangan ikan maupun pengepak sedotan, pekerja rumahan pengepak dupa memiliki risiko yang lebih besar karena menggunakan bahan kimia yang kuat.¹⁷

Selain berhadapan dengan persoalan keselamatan kerja, pekerja rumahan di desa ini juga menghadapi persoalan ekonomi yang cukup pelik. Karena upah mereka yang kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sering meminjam uang kepada rentenir. Di desa ini, rentenir sering disebut sebagai Bakri atau Batak Kredit. Selain itu, pekerja rumahan yang bekerja di bidang pembuatan panggangan ikan, pembungkusan sedotan air mineral maupun pengepakan dupa selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Konteks desa yang diwarnai oleh politik kekeluargaan membatasi pelibatan perempuan, termasuk pekerja rumahan, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Alif (kepala desa), telah menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode yaitu periode 1996-2004, periode 2012-2018, dan periode 2018-2024. Kondisi ini memperkuat politik keluarga yang dilakukan oleh kepala desa. Ia menempatkan keluarganya untuk duduk di struktur pemerintahan desa dan mendistribusikan program desa hanya kepada keluarganya sendiri. Sekretaris desa merupakan adik kandung Kades. Sebelum menjadi Sekdes ia menjabat sebagai Humas Pemdes. Selain itu, ada Rauf yang menjabat sebagai staf desa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kades. Ria yang menjabat sebagai kaur juga merupakan adik kandung Bu Kades.¹⁸

Politik berbasis keluarga yang dilakukan oleh kepala desa ini menyebabkan distribusi program kesejahteraan desa bersifat eksklusif, hanya berputar di antara keluarga kepala desa saja. Misalnya, jika ada bantuan datang dari pemerintah kabupaten, maka yang diutamakan adalah keluarga kades. Bantuan berupa beberapa mesin jahit dari pemerintah kabupaten diletakkan di rumah kades. Akibatnya, ibu-ibu warga biasa merasa segan untuk menjahit di sana, meskipun telah diputuskan bahwa semua warga bisa memanfaatkan mesin jahit di

¹² Wawancara Reni, Ketua Credit Union Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

¹³ Wawancara Reni, Ketua Credit Union Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

¹⁴ Wawancara Diana, Ketua Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

¹⁵ Wawancara Mila, Wakil ketua DPC SPR dan Koordinator Lapangan Pembungkus Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

¹⁶ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

¹⁷ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

¹⁸ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

sana. Begitu pula jika ada program pelatihan baik dari pemerintah maupun pihak luar, maka keluarga kadeslah yang diutamakan menjadi peserta.¹⁹ Karena program kesejahteraan hanya dikuasai oleh keluarga kepala desa, perempuan-perempuan di desa, termasuk pekerja rumahan, tidak memiliki akses untuk mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.

"Mesin bordir ada empat di situ [rumah Pak Kades], dulu kan ada bantuan pelatihan bordir. Dibidang dinas kan dibagi per dusun satu tapi cuma diletakkan di situ aja, kalau mau bordir mesti ke sana. Tidak boleh dipinjam ke sini. Nanti seumpama ada pelatihan, itu nanti keponakan istrinya, keponakan dia jadi peserta. Tapi memang campur juga sih, jadi daripada orang lain kan mending keluarga besar mereka." (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Selain terkait dengan distribusi program kesejahteraan, pengambilan keputusan pemerintah desa juga tidak dilakukan secara partisipatif. Rapat desa maupun Musrenbang hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah desa yang pada dasarnya masih kerabat kepala desa. Menurut penuturan Diana yang menjabat sebagai Kader Posyandu anak dan Kader PKDRT (Pendamping Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), ia hanya dilibatkan dalam musyawarah desa jika ada pembahasan terkait Posyandu maupun KDRT.

"Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan KDRT atau tentang Posyandu, itu baru saya dilibatkan. Kalau musyawarah desa saya belum pernah ikut. Belum pernah dilibatkan. Kalau Musrenbang saya tahunya udah siap "oh semalam ada Musrenbang". Kalau udah Musrenbang kami itu kayak pilih-pilih gitu lah, yang diikutkan Musrenbang itu dipilih-pilih dia." (Diana, Kader Posyandu Anak dan PKDRT, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019).

Selain kuatnya politik keluarga di pemerintahan desa, perempuan menghadapi kendala untuk mengembangkan diri maupun berkontribusi dalam pemerintahan desa karena kuatnya budaya patriarki. Di desa ini, ada anggapan yang kuat bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.²⁰ Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Mia, sekretaris DPP Serikat Pekerja Perempuan yang berasal dari desa ini:

"Kalau orang desa kita sih juga gitu, jadi kalau pemimpin perempuan itu kurang sreg, mereka lebih cenderungnya pemimpin laki-laki." (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Mia sendiri, merasa tidak percaya diri untuk menjadi pemimpin di tingkat desa karena masyarakat umum menganggap laki-laki yang lebih pantas menjadi pemimpin di desa. Konteks kabupaten dan desa sangat memengaruhi bagaimana aksi kolektif perempuan dapat dilakukan. Salah satu penyebab adanya anggapan bahwa hanya laki-laki yang menjadi pemimpin terkait dengan kuatnya adat Batak di wilayah ini. Kabupaten Deli Serdang yang didominasi oleh Suku Batak masih sangat menjunjung nilai identitas etnis maupun kekeluargaan dalam pemerintahan kabupaten maupun desa. Secara kultur, ada Batak mengutamakan peran dominan laki-laki di ruang publik. Selain itu, bagi orang Batak, identitas etnis yang dilekatkan pada kaum laki-laki sangat penting baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun mendekati pemerintah.²¹

Selain konteks kabupaten dan desa, penting kiranya melihat lebih jauh konteks gerakan buruh di Sumatera Utara secara lebih luas. Provinsi ini dikenal dengan sejarah gerakan buruh yang kuat. Sejak masa Orde Lama, kekuatan sayap kiri yang dimotori oleh PKI telah mendarah daging dalam bentuk proses pengorganisasian kepentingan ekonomi perkebunan di Medan (Panggabean, 2009). Pada masa itu, beberapa organisasi buruh yang ada yaitu Ekonomi Republik Rakyat Indonesia (ERRI), Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) (Panggabean, 2009). Pasca runtuhnya Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru, semua organisasi buruh yang mendukung PKI pun dihabisi,

¹⁹ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

²⁰ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

²¹ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

termasuk di dalamnya SARBUPRI dan SOBSI (Hadiz, 1998). Setelahnya, gerakan serikat buruh pun melemah, meskipun tidak menghilang sama sekali.

Orde Baru pun membentuk serikat buruh baru yang bersifat tunggal, yaitu FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) pada tanggal 20 Februari 1973 yang diketuai Agus Sudono. FBSI ini dikuasai penuh oleh Golkar. FBSI juga menerapkan prinsip hubungan kerja industrial antara pengusaha dan buruh (Hadiz, 1998). Namun, hadirnya FBSI justru banyak membungkam buruh dan membiarkan intervensi militer dalam organisasi. Dalam perjalanannya, FBSI kemudian berganti nama menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 1985. Nyatanya, SPSI dirasa belum mampu untuk mawadahi aspirasi dan gerakan buruh, sehingga mulai banyak bermunculan LSM daerah sebagai wadah serikat buruh alternatif. Hal ini kemudian melahirkan serikat buruh independen, SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada tanggal 25 April 1992 melalui Pertemuan Buruh Nasional di Bogor yang dihadiri oleh 104 aktivis LSM dan buruh (Parapat, 2016). Kerusuhan Medan pada tanggal 14 Maret 1994 menjadi titik balik bagi SBSI dan organisasi lainnya untuk bergerak total dan masif dalam membela buruh. Sejak saat itu, mulai banyak gerakan sosial bagi buruh atau serikat buruh muncul, khususnya di Sumatera Utara. Intinya, di provinsi ini, sejarah gerakan buruh telah berurat akar, dan pergantian rezim pemerintahan tidak mengubah karakter sejarah ini.

Kuatnya sejarah gerakan buruh yang cukup kuat di Sumatera Utara memiliki implikasi signifikan terhadap upaya gerakan kolektif pekerja rumahan perempuan yang tergabung di dalam SPR-Sejahtera. Serikat-Serikat buruh di Sumatera Utara memberikan dukungan kepada pekerja rumahan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Rumahan (AMPPR) untuk mendorong ranperda tentang pekerja rumahan.

2. Keterbatasan Sumber Penghidupan Perempuan

Perempuan di desa ini masih menghadapi persoalan kemiskinan. Mereka tidak memiliki banyak pilihan lapangan pekerjaan, selain bekerja sebagai buruh di perusahaan maupun pekerja rumahan. Sebelum menjadi pekerja rumahan, ada beberapa perempuan yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa. Salah satunya adalah Reni, Ketua Credit Union PKTD sedotan air mineral, yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan mie instan sebelum bekerja sebagai pembungkus sedotan air mineral.²²

Selain menghadapi persoalan ekonomi, pekerja rumahan tidak menyadari dirinya sebagai pekerja. Ini bukan hanya terjadi di desa penelitian, tetapi juga di seluruh Indonesia. Mereka menganggap bahwa menganyam kawat, membungkus pipet maupun meracik pinang hanya sebagai sambilan, bukan sebagai pekerjaan. Mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut sambil mengasuh anak, sambil berkumpul bersama keluarga maupun tetangga.²³

“Ya masing-masing gitu, kami kan tidak tahu kalau kami bekerja kan. Ya saling cuek lah gitu kan. Ambil barang kadang-kadang rebut-rebutan gitu. Kami kan belum mengerti gitu kan kalau kami adalah pekerja.” (Mia, Sekretaris DPP SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019)

Selain kurangnya pengakuan pemerintah terhadap pekerja rumahan, persoalan lain yang harus dihadapi oleh pekerja rumahan yaitu tiadanya jaminan kecelakaan kerja dari pemberi kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, mereka pula yang harus menanggung biaya untuk berobat.²⁴ Kecelakaan kerja memang berskala kecil dan biasanya hanya diketahui oleh lingkup keluarga, misalnya tangan pekerja rumahan tergores atau terkena pisau.²⁵ Selain tidak adanya jaminan keselamatan kerja, sebagai bentuk dari fleksibilitas pasar tenaga kerja,

²² Reni, Ketua Credit Union PKTD Sedotan Air Mineral, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

²³ Wawancara Santi dan Mia, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, 7 November 2019.

²⁴ Wawancara Santi dan Mia, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

²⁵ Wawancara Ruslam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara, 7 November 2019.

pekerja rumahan tidak memiliki jam kerja yang pasti. Mereka bahkan dapat bekerja hingga malam, atau kadang tidak ada pekerjaan sama sekali.²⁶ Selain itu, pekerja rumahan juga rentan melibatkan anak-anak sebagai pekerja.

“Saya tertarik dengan isu pekerjaan rumah ini. Kenapa, kan yang paling banyak pelaku pekerjaan rumah ini pasti ya perempuan dan anak-anak kan. Karena ketertarikan itu kemudian kita coba cari peluang, isu ini kan tidak akan bisa menjadi isu yang hangat dibicarakan kalau pertama tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan.” (Ruslam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara, 7 November 2019)

Sebelum BITRA masuk ke desa ini, pekerja rumahan bekerja secara individual, dan tidak berkaitan dengan pekerja lain. Pekerja rumahan datang sendiri untuk mengambil bahan baku maupun mengantar barang jadi kepada tauke. Untuk mendapatkan bahan baku dari tauke, mereka bahkan saling berebut dan cekcok meskipun saling bertetangga.^{27,28}

Perempuan pekerja rumahan juga menghadapi kendala di dalam internal rumah tangga mereka. Sebelum BITRA masuk ke desa ini, perempuan belum mampu mengembangkan diri untuk berorganisasi. Ada anggapan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya, sebagaimana yang diceritakan oleh Reni:

“Nah kenapa gender karena pada umumnya itu perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Jadi tidak boleh perempuan ke manapun apalagi kita muslim, jelas. Dan ibu-ibu ini memang rata-rata itu memang tidak diperbolehkan suaminya keluar rumah.” (Reni, Ketua Credit Union PKTD Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019)

Perempuan dibebankan untuk mengurus rumah tangga, sehingga suami mereka keberatan jika mereka berorganisasi, yang menyebabkan mereka banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Misalnya, ketika mengikuti perkumpulan di Kota Medan, beberapa perempuan dilarang untuk datang oleh suaminya.²⁹

“Mungkin lagi ada masalah, pokoknya rumah tanggalah kaya anak itu jangan ditinggal, diurusin. Pernah itu, udah mau berangkat itu udah ditunggu di persimpangan tapi tidak jadi.” (Reni, Ketua Credit Union PKTD Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019).

Selain menghadapi persoalan terkait dengan ketiadaan payung hukum yang melindungi pekerja rumahan dan persoalan internal keluarga, perempuan yang bergabung di Serikat Pekerja Rumahan (SPR)-Sejahtera juga menghadapi persoalan berkaitan dengan partisipasi dalam pembuatan keputusan di level desa. Pelibatan perempuan dalam musyawarah desa masih terbatas pada Ketua PKK, Ibu Kadus, dan Ketua Majelis Taklim. Sementara perempuan yang bergabung dalam SPR Sejahtera belum dilibatkan dalam musyawarah desa.³⁰ Menurut keterangan dari Kepala Desa, perempuan sudah dilibatkan dalam rapat-rapat desa yang ada. Dulu, ibu-ibu hanya ikut rapat karena ada anggaran PKK untuk kegiatan kelompok seperti keterampilan, sosialisasi kesadaran KDRT dan hukum yang kemudian dilombakan hingga tingkat provinsi dan nasional. Biasanya, perempuan-perempuan yang terlibat dalam rapat adalah bidan desa, ketua PKK, ketua dasawisma (Ibu Kadus), ketua majelis taklim (perempuan).³¹

Sedangkan menurut anggota SPR sendiri, selama ini SPR tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa maupun kegiatan desa lainnya. Informasi tentang Musrenbang maupun Musdes sangatlah tertutup. Musyawarah di tingkat dusun juga tidak pernah ada. Rapat desa terbatas dihadiri oleh aparat desa dan tokoh

²⁶ Wawancara Santi dan Mia, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

²⁷ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

²⁸ FGD dengan PKTD Kawat, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

²⁹ Wawancara Santi dan Mia, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

³⁰ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

³¹ Wawancara Alif, Kepala Desa, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

masyarakat³², dan kebanyakan adalah keluarga kades sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Ulim, suami Mia, pernah diundang ke dalam rapat desa sebagai perwakilan tokoh masyarakat. Satu-satunya kegiatan yang ada yaitu wiridan (kegiatan pengajian) yang dilaksanakan setiap minggu. Padahal, SPR sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti Musrenbang karena pernah mendapatkan pelatihan dari BITRA.³³

Sejauh ini, SPR hanya dilibatkan dalam implementasi dari program desa, sedangkan perencanaan belum dilibatkan. BITRA dan SPR sudah mencoba melakukan audiensi ke Pemdes untuk perencanaan RPJMDes. Ketika itu, Kades mengiyakan tapi tidak direalisasikan. Rina program manager BITRA, menjelaskan sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Kemudian soal implementasi Undang-Undang Desa, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, misalnya rumusan rancangan pembangunan desa jangka menengah. Kita sudah dorong teman-teman pekerja rumahan supaya masuk ikut merumuskan itu bahkan jadi Pokja. Mereka teman-teman pekerja rumahan sudah kita beri pembelajaran bagaimana merumuskan RPJMDesa yang partisipatif. Tetapi di proses perjalanan, ini tidak terjadi.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Hal ini karena pemerintah desa hanya menduplikasi RPJMDes dari desa lain dan tidak ada penyusunan yang partisipatif.³⁴

“Deli Serdang itu agak aneh. Jadi kepala desa-kepala desa ini pada umumnya itu copy-paste semua RPJMDesa-nya dari camat. Oleh karena itu pembuatan dokumen RPJMDesa-nya dia tidak secara partisipatif. Jadi kadang-kadang dia cuma copy dari daerah lainnya yang belum tentu cocok dengan desanya. Tetapi dalam rangka memenuhi bahwa semua desa itu harus ada RPJMDesa, kan ini kewajiban setelah tiga bulan kepala desa terpilih, ya sudah dicopy-nya saja dari yang lain. Jadi prinsip-prinsip partisipatif melibatkan masyarakat desa, salah satunya homeworkers itu, itu tidak terjadi. Tapi kita sudah berupaya mendorong itu.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Terkait dengan implementasi program desa, menurut Diana, Ketua PKTD Sedotan, perempuan masih membutuhkan pemberdayaan. Selama ini, pemberdayaan desa hanya dilakukan melalui PKK yang kegiatannya hanya arisan. Pemdes pernah mengadakan pelatihan (misalnya pelatihan menjahit, bunga akrilik, sulam, membuat makanan), namun masih menyisakan persoalan. Pertama, sasaran pelatihan tidak tepat. Pelatihan hanya melibatkan orang-orang Pemdes dan keluarganya. Kedua, pelatihan tidak berkelanjutan. Setelah memiliki keterampilan, perempuan terhalang oleh modal maupun teknik pemasaran.

3. Penguatan Pekerja Rumahan Melalui Program BITRA

Pekerja rumahan mulai menyadari posisinya sebagai pekerja dan hak-haknya sebagai pekerja setelah adanya program dari BITRA. BITRA mulai aktif dalam isu pekerja rumahan sejak bekerja sama dengan ILO-MAMPU pada tahun 2014, yaitu ketika melakukan pemetaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Dari hasil penelitian ini, ILO melihat bahwa pekerja rumahan memberikan kontribusi untuk perekonomian rumah tangga secara signifikan. Namun, mereka bekerja dalam kondisi kerja di bawah standar yang berlaku dan karenanya diperlukan upaya oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja para pekerja ini (Allen, dkk, 2015, 54). Dalam penelitian tersebut, BITRA terlibat dalam survei untuk memetakan pekerja rumahan di wilayah Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rina:

“Sebelum jadi submitra, saya sama Ina dulu udah jadi enumerator penelitian ILO. Nah jadi kalau di Medan itu dulu agak resisten banget (terhadap LSM) sebenarnya sampai kita diusir-usir ya yang pertama.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019).

³² Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

³³ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

³⁴ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

Setelah program dengan ILO selesai, BITRA secara langsung bekerja sama dengan MAMPU untuk isu pekerja rumahan pada tahun 2015.³⁵

Sebelum memulai pengorganisasian pekerja rumahan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BITRA. Pertama, pemetaan sektor pekerja rumahan dan wilayah di mana mereka tinggal. Pada tahap ini, BITRA belum memiliki staf lapangan, dan proses pemetaan dilakukan oleh Rina, Program Manager Program MAMPU di BITRA.³⁶ Kedua, proses identifikasi penerima manfaat. Pada tahap inilah Diah dan Sinta direkrut sebagai staf lapangan dan mulai terlibat dalam proses pra-pengorganisasian. Ketiga, pembentukan kelompok berdasarkan sektor pekerjaan. Pada tahun pertama, BITRA memilih lima kelompok dari sektor pekerjaan yang berbeda dengan mempertimbangkan anggaran pengorganisasian yang terbatas. Ketiga tahapan ini dilakukan sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2015.³⁷

Selama proses tersebut, Diah dan Sinta secara intensif setiap hari mendatangi pekerja rumahan dari rumah ke rumah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja rumahan atas hak-haknya sebagai pekerja rumahan. Menurut Diah, tidak mudah proses meyakinkan pekerja rumahan. Bahkan kadang Diah dianggap mengganggu pekerjaan mereka.³⁸ Untuk mengatasi hal tersebut, Diah berkali-kali mendatangi pekerja rumahan tanpa kenal pantang menyerah selama tiga bulan sampai pekerja rumahan menyadari hak-haknya sebagai pekerja.

"Sampai 3 bulan [mendatangi rumah-rumah] setiap hari mendatangi lima sektor. Setiap hari harus datang rumah ke rumah, dari rumah ini nanti tanya lagi mana lagi rumah yang sektornya sama atau yang kerjanya [pekerja] rumahan. Kadang keluarganya juga agak menghambat, misalnya ngomong "Jangan ajak istriku," dengan wajah cuek, ga senang, ga mau nyapa. Kalau ditanya kerjanya, jawabannya ibu rumah tangga tapi sambil kerjain nganyam kawat. Baru lama-lama dipahami bahwa mereka adalah pekerja yang mendapatkan upah setelah diberikan pemahaman awal tentang pekerja dan organisasi." (Diah, Staf Lapangan BITRA, desa penelitian di Deli Serdang, 11 November 2019)

BITRA memiliki beberapa program kerja yang ditujukan untuk menguatkan pekerja rumahan, di antaranya pembentukan kelompok pekerja rumahan, pembentukan Serikat Pekerja Rumahan, pembentukan Sekolah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pekerja (SPPR), pembentukan Credit Union (CU), dan mendirikan usaha mandiri.

3.1. Pembentukan Kelompok Pekerja Rumahan

Setelah pekerja rumahan memiliki kesadaran, mereka membentuk kelompok pekerja rumahan dengan difasilitasi oleh BITRA. Pembentukan kelompok pekerja rumahan merupakan salah satu strategi BITRA untuk menguatkan posisi tawar pekerja rumahan dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu, pembentukan kelompok pekerja rumahan juga dapat memudahkan pengorganisasian pekerja rumahan. Upaya membentuk kelompok pekerja rumahan bukan hal yang mudah. Proses pendekatan ke pekerja rumahan dilakukan berkali-kali sebagaimana disampaikan oleh Rina:

"Yang pertama kan gini, kita datang dulu satu, satu, satu, setelah kita datang, sudah kita jelaskan, maksud dan tujuan, terus status mereka, nanti ada sekitar lima orang kita kumpulkanlah di rumah siapa yang sudah lebih welcome dengan kita kan. Ngobrol di situ. Nah dari sini nanti mereka juga akan membantu kita, oh di sana ada teman kami, nanti ikutlah sama ibu biar bisa ngomong. Baru datang lagi satu, satu, satu rumah lagi. sampai 15 orang baru kita kumpul. Kita kumpul barulah diskusi awal, pekerja rumahan itu adalah ini, undang-undang begini, kita mulai sadarkan dari situ. Paling kan sekitar tiga undangan baru bisa terbentuk kelompok beneran. Nah

³⁵ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 7 November 2019.

³⁶ Wawancara Rina Program Manager BITRA, Deli Serdang, 7 November 2019.

³⁷ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

³⁸ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

setelah terbentuk kelompok, dengan sendirinya teman-teman yang sudah buat yang kita datangi ini, mereka juga akan mengajak teman-temannya.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Untuk memudahkan pengorganisasian, BITRA membagi Deli Serdang menjadi dua wilayah, yaitu barat dan timur. Untuk wilayah Timur, terdapat tujuh kelompok di dua kecamatan (satu di antaranya yaitu Tanjung Morawa). Untuk wilayah barat, terdapat empat kelompok di Kecamatan Sunggal dan Hamparan Perak.³⁹ Di setiap wilayah, BITRA menempatkan staf lapangan untuk melakukan pengorganisasian. Strategi yang digunakan yaitu dengan cara *live in* atau tinggal bersama masyarakat di desa. Staf lapangan dipilih dari perempuan lokal dengan mempertimbangkan kesamaan suku dan bahasa untuk mempermudah proses pendampingan.⁴⁰ Setelah terbentuk kelompok, para pekerja rumahan menyadari adanya kebutuhan organisasi yang lebih besar sehingga tercetuslah gagasan untuk membentuk Serikat Pekerja Rumahan.

3.2. Pembentukan Serikat Pekerja Rumahan (SPR)-Sejahtera

Pada Desember 2014 BITRA menyelenggarakan pra-kongres pekerja rumahan, dan pada Januari 2015, dilakukan pembentukan dan penguatan serikat pekerja melalui kongres Serikat pekerja rumahan. Ketika itu, ada 10 sektor yang terdiri dari lima sektor dari Deli Serdang dan lima sektor dari Medan. Pada kongres inilah para pekerja rumahan mencapai kesepakatan untuk membentuk Serikat Pekerja Rumahan.

“Pekerja rumahan ini dulu, balik lagi ke awal ceritanya kan, pekerja rumahan ini dulu setelah kita organisir dibentuklah kelompok. Setelah ada kelompok, mereka pengen yang lebih besar, ada-lah payung organisasi, dikongreskan-lah namanya serikat pekerja rumahan. Serikat pekerja rumahan ini menjadi organisasi mereka, karena mereka juga bekerja, menjadi serikat.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Keberhasilan dalam pembentukan Serikat Pekerja Rumahan merupakan capaian penting BITRA, sebab mereka melampaui target yang telah ditetapkan yaitu membentuk kelompok pekerja rumahan.⁴¹ Secara garis besar, struktur SPR Sejahtera terdiri dari beberapa level. Di level desa, terdapat Pimpinan Kelompok Tingkat Desa (PKTD), di level kabupaten, terdapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan di level provinsi terdapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPR Sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu, di desa ini terdapat tiga kelompok pekerja rumahan berbasis jenis bidang yang digeluti oleh para perempuan pekerja rumahan. *Pertama*, kelompok dupa yang terbentuk sejak tahun 2016. Kelompok ini diketuai oleh Liana dengan jumlah anggota 37 orang. *Kedua*, kelompok pipet terbentuk tahun 2015 yang diketuai oleh Diana dengan jumlah anggota 50 orang. *Ketiga*, kelompok kawat dibentuk tahun 2014 yang saat ini diketuai oleh Nia, dengan jumlah anggota 38 orang.⁴² Dengan demikian, total anggota kelompok di desa ini yang difasilitasi BITRA adalah sebanyak 125 orang.

Sebelum ada Serikat Pekerja, program kelompok sebatas pada diskusi dan kegiatan sosial seperti mengunjungi anggota kelompok yang sakit. Namun, setelah adanya serikat, program menjadi lebih sistematis. Pada awalnya, pekerja rumahan mendapatkan pelatihan tentang pengorganisasian. Dari pelatihan ini dibentuklah “Tim 30” yang anggotanya masing-masing bertugas untuk merekrut satu pekerja rumahan lain yang belum masuk serikat. Tim 30 ini terdiri dari perwakilan serikat dari Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat. Sekitar 50% tim ini berhasil merekrut anggota baru.⁴³ Pendampingan program SPR sebenarnya linier dengan program BITRA secara umum, yaitu program pengembangan organisasi (pengorganisasian). Pengembangan organisasi dilakukan dengan perluasan kelompok hingga menjangkau wilayah lain. Hambatan dari aktivitas ini adalah

³⁹ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

⁴⁰ Wawancara Kartika, Direktur BITRA, 14 Juli 2020.

⁴¹ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

⁴² Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

⁴³ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

sukarnya menumbuhkan kepercayaan pada pekerja rumahan dan keluarganya karena adanya stigma negatif terhadap LSM di Sumatera Utara yang dianggap hanya mencari keuntungan dari masyarakat.⁴⁴

“Ya ada juga yang takut, cuma was-was ini dari mana kan gitu kan, ya untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada kita kan sulit gitu. Jadi pada waktu itu tiga bulan setiap hari kita harus ke lapangan.” (Diah, Staf Lapangan BITRA, 9 November 2019).

3.3. Pembentukan Sekolah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR)

Untuk meningkatkan kapasitas pekerja rumahan, BITRA membentuk diskusi kelompok dan Sekolah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR). Diskusi kelompok rutin diselenggarakan setiap bulan di setiap PKTD. Mereka belajar tentang gender, kepemimpinan, negosiasi, serta pelatihan keterampilan seperti *acupressure* dan menjahit. Sedangkan SPPR dilakukan di level kabupaten dengan menghadirkan perwakilan PKTD. Melalui SPPR, pekerja rumahan belajar bagaimana melakukan lobi dan negosiasi, peningkatan pengetahuan serta kapasitas yang rutin, serial, dan tematik. Setelah itu, pekerja rumahan yang telah mengikuti pelatihan diharapkan untuk langsung praktik di luar kelas untuk negosiasi dan lobi dengan dinas sosial dan kepala desa.⁴⁵

Para anggota SPR kerap mengalami tantangan dalam partisipasi mereka di pelatihan-pelatihan ini. Tantangan sering datang dari orang terdekat di keluarga, seperti suami yang kurang menyetujui kegiatan-kegiatan perempuan yang dilakukan di luar. Suami Mia, misalnya, kurang senang karena kegiatan-kegiatan BITRA umumnya dilaksanakan di hotel dan restoran. Sang suami terpengaruh oleh pandangan negatif sekelompok masyarakat konservatif tentang buruknya citra perempuan yang sering pergi ke kedua tempat ini. Walaupun demikian, Mia tetap bersikukuh pergi dan menunjukkan manfaat yang ia terima kepada suaminya. Pada setiap pelatihan, Mia mendapatkan beragam manfaat dan pengetahuan baru, seperti persoalan tentang gender, kesehatan dan keselamatan kerja, hukum, dan undang-undang ketenagakerjaan. Keterampilan Mia pun semakin terasah berkat pelatihan-pelatihan yang diberikan, seperti menjahit dan memasak. Kegigihan, ketekunan dan perubahan baik yang ditunjukkan Mia membuat suaminya mendukung penuh seluruh kegiatan yang ia ikuti.

“[Kalau ada salah] ‘Tapi udah belajar gender’, jadi selalu Bapak yang mengingatkan seperti itu. Jadi haruslah apa yang diberikan dalam pelatihan itu dijalankan juga. Kadang-kadang kita perempuan ini kan, kebablasan sedikit ngomongnya. Kadang kan agak meningkat dikit suara kita dari suami. Itu dia langsung di situ masukannya, ‘tapi sudah belajar gender, kok gitu sih.’” (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Mia menjadi lebih giat dalam serikat dan kelompok setelah mendapatkan dukungan dari suaminya, dan didukung oleh seluruh anggota keluarganya. Mia menjadi salah satu anggota SPR yang paling cepat belajar. Perjalanannya aktif berorganisasi dimulai sejak bulan Juni 2014 ketika ia mulai bergabung dengan kelompok pekerja rumahan di tingkat desa, yakni di level Pimpinan Kelompok Tingkat Desa (PKTD). Hanya dalam waktu enam bulan, Mia telah menjadi anggota PKTD sektor kawat. Ia kemudian dipilih menjadi Ketua Kelompok PKTD Kawat pada tahun 2015. Karir organisasinya semakin meroket ketika ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPR Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang periode 2016-2019. Di tengah jabatannya sebagai Ketua DPC SPR Sejahtera, Mia juga ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sejak 2019, Mia dipilih sebagai Sekretaris DPD SPR Sejahtera melalui kongres anggota.

Melalui SPR, Mia kerap membagikan pengetahuannya tentang hak dan status kerja kepada ibu-ibu pekerja rumahan lainnya. Ia menerapkan pendekatan kekeluargaan dengan cara sering berkunjung ke kediaman para

⁴⁴ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

⁴⁵ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 7 November 2019.

pekerja rumahan. Mia kemudian mengajak ibu-ibu tersebut untuk melanjutkan diskusi di rumahnya. Seri diskusi pertama diikuti oleh sebelas orang peserta. Mia benar-benar memperhatikan para pekerja yang datang ke rumahnya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat, para peserta yang awalnya masih canggung satu sama lain menjadi semakin akrab. Pada pertemuan kelima para pekerja tersebut sudah memiliki struktur kelompok pekerja sendiri.

“Nah iya, kalau nggak salah pertama itu sebelas orang dan masih cuek, masih sombong. Terus pertemuan lagi yang kedua. Lalu berlanjut terus, makin akrab makin akrab. Terus pertemuan kedua kita udah pendataan ya. Pertemuan ketiga sudah mulai mau. Yang kelima sudah Konferensi Tingkat Anggota/Konperta. Pokoknya kami itu selalu ke sana berkunjung bolak-balik.” (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Tak hanya Mia, para perempuan pekerja rumahan lain yang bergabung dalam PKTD Panggangan Ikan mempraktikkan langsung materi tentang mogok kerja yang telah didapatkan di SPPR. Pada tahun 2015, PKTD Panggangan Ikan menginisiasi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah.⁴⁶ Ketika itu, semua anggota PKTD Kawat bersepakat untuk mogok dan mengirimkan perwakilan PKTD untuk melakukan negosiasi dengan tauke yang mewakili pengusaha. Pada awalnya, perusahaan tidak mau memenuhi tuntutan para pekerja rumahan. Karena pekerja rumahan tetap melakukan mogok selama dua minggu, pengusaha memutuskan memberikan kenaikan gaji lebih dari dua kali lipat, yang awalnya Rp1.400,00 untuk panggangan ikan ukuran kecil menjadi Rp4.000,00.⁴⁷

“Mogok kerja semuanya, selama sebulan. Ibu inilah dulu. Nggak ada yang nganyam satupun. Jadi lama-lama kan bosnya nyerah, ya udahlah, naikanlah berapa rupiah gitu. Yang kecil itu dinaikkannya gopek. Yang sedang nanti dinaikkannya Rp1.000,00. Yang jumbo Rp1.500,00.” (Dita, Anggota PKTD Kawat, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

3.4. Pembentukan Credit Union

Sejak 2016, Credit Union (CU) pekerja rumahan dibentuk untuk membangun kemandirian ekonomi pekerja rumahan sekaligus memutus ketergantungan pada rentenir. Pada awalnya ada 10 kelompok CU. CU menjadi ikatan pemersatu antara pekerja rumahan dengan keluarganya. Sebab, suami pekerja rumahan juga dapat menjadi anggota biasa CU. Begitupula anak-anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun dapat menjadi anggota luar biasa, dengan ketentuan tidak boleh melakukan pinjaman. CU bermanfaat untuk memutus ketergantungan mereka pada rentenir. Saat ini, pekerja rumahan lebih memilih meminjam ke CU, kecuali benar-benar terpaksa akan pinjam ke rentenir.⁴⁸

“Banyak yang berubah rata-ratah dari mereka merasakan perubahan yang terjadi setelah ada CU di kelompok ya terkait inilah ya, kebutuhan sehari-hari. Dulu kan mereka harus pinjam ke rentenir, semua di sini rata-rata rentenir. Ada Bakri katanya, Batak Kredit. Meskipun belum bisa sampai menghabiskan total sih, karena kan masih terbatas mereka kan bisa meminjam itu dari simpanan-simpanan yang mereka lakukan sendiri.” (Diah, Staf Lapangan BITRA, 9 November 2019)

3.5. Pembentukan Unit Usaha Ekonomi

Upaya lain guna mendorong kemandirian ekonomi, selain membentuk CU adalah mendorong serikat pekerja rumahan untuk membentuk unit usaha ekonomi di luar bidang usaha yang sudah dikerjakannya (panggangan ikan, pengepakan sedotan dan pengepakan dupa). Unit usaha ekonomi ini dikelola secara kolektif oleh anggota serikat pekerja rumahan. Tujuan dari pembentukan unit usaha yaitu untuk melakukan diversifikasi ekonomi pekerja rumahan. Selain itu, unit usaha ini sekaligus ditujukan untuk mendapatkan masukan keuangan yang teratur dan mengurangi ketergantungan keuangan serikat pekerja pada BITRA untuk pendanaan kegiatan.

⁴⁶ FGD PKTD Kawat, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

⁴⁷ FGD PKTD Kawat, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

⁴⁸ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

Dalam jangka panjang, sebagian pendapatan dari unit usaha ekonomi ini akan masuk ke dalam keuangan SPR di tingkat DPC dan tingkat DPD.

Terdapat dua unit usaha yang sampai saat ini sudah terbentuk di desa ini. Pertama, usaha pembuatan sprej dengan nama “Maju Jaya Collection” yang dirintis sejak September 2017 di Dusun II. Pembuatan sprej dipilih karena beberapa pekerja rumahan telah memiliki keterampilan menjahit yang mereka dapatkan ketika bekerja di perusahaan garmen.⁴⁹ Unit usaha ini menjadi eksperimentasi ekonomi yang dilakukan oleh BITRA untuk mendorong pekerja rumahan mengembangkan potensi individu. Ada 8 orang anggota SPR Sejahtera yang bergabung dalam usaha ini, 5 orang berada di bagian produksi dan 3 orang di bagian pemasaran.⁵⁰ Kedua, usaha pembuatan keripik pisang dan keripik ubi dengan nama “Melati Jaya” yang terdiri dari lima orang pekerja rumahan. Selain itu, anggota SPR juga memiliki usaha individu, misalnya jualan bakso, kue, makanan, dll. Unit usaha ini juga targetnya akan berkontribusi untuk SPR.⁵¹ Usaha individu ini terus dikembangkan oleh anggota SPR dengan memanfaatkan pengetahuan tentang produksi maupun pemasaran yang didapatkan dari SPR.

4. Perubahan di Level Individu dan Institusional

Perempuan yang bergabung dalam SPR Sejahtera telah mengalami berbagai perubahan penting, baik di level individu, komunitas/organisasi maupun dalam berelasi dengan institusi pemerintah. Perubahan di level individu di antaranya yaitu meningkatnya kesadaran perempuan pekerja rumahan atas hak-haknya, penguatan posisi tawar perempuan ketika bernegosiasi dengan perusahaan, dan peningkatan ekonomi pekerja rumahan. Sementara terkait dengan perubahan institusional, SPR berupaya mendorong pengesahan Raperda Pekerja Rumahan, mengakses program kesejahteraan dari pemerintah dan membangun interaksi dengan pemerintah desa. Perubahan yang telah dicapai oleh gerakan kolektif perempuan pekerja rumahan tidak lepas dari peran BITRA dan dukungan dari serikat buruh lain di wilayah Sumatera Utara.

4.1. Perubahan Individual

Perempuan pekerja rumahan mengalami perubahan penting setelah bergabung ke dalam SPR Sejahtera. Sebelum bergabung ke dalam serikat, mereka tidak memahami bahwa mereka adalah pekerja. Mereka menganggap bahwa pekerjaan menganyam kawat, mengepak sedotan dan mengepak dupa hanya sebagai pekerjaan sambilan untuk mengisi waktu luang.⁵² Setelah bergabung dalam serikat dan mengikuti diskusi-diskusi, mereka dapat memahami bahwa pekerja rumahan layak mendapatkan hak-hak dan mendapatkan upah layak sebagaimana disampaikan oleh Mila, Wakil Ketua DPC SPR Sejahtera.

“Terus kan kalau kerja sendiri-sendiri tidak ada perlindungan apa-apa, kalau kerja sendiri tanggung sendiri, nggak punya BPJS, nggak punya K3. Jadi makanya kami membentuk organisasi, sehingga banyak yang kami dapat setelah membentuk organisasi.” (Mila Wakil Ketua DPC SPR Sejahtera, 9 November 2019)

Selain munculnya kesadaran atas hak-haknya, anggota SPR-Sejahtera mengalami peningkatan kapasitas pengetahuan. Diskusi-diskusi SPR Sejahtera yang diselenggarakan secara rutin memberikan pengetahuan baru tentang gender maupun teknik pengorganisasian. Pembelajaran teori pengorganisasian ini kemudian diaplikasikan di lapangan oleh anggota serikat. Anggota SPR Sejahtera belajar untuk mencari pekerja rumahan di desa lain untuk diajak bergabung ke dalam serikat. Mereka mensosialisasikan mengenai adanya Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera yang didampingi oleh BITRA dan memberikan kesadaran bagi pekerja

⁴⁹ Wawancara Santi dan Mia, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

⁵⁰ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

⁵¹ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

⁵² Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

rumahan bahwa mereka berhak atas perlindungan sosial dan lainnya, dan ini dapat diperjuangkan melalui serikat.⁵³

“Pertemuan sebulan sekali. Satu bulan kemudian, diajaklah ke Medan, pelatihan gitu. Kita pelatihan keorganisasian. Jadi kita sertifikasi materi-materi itu. Mengajak anggota langsung kita praktikkan. Yang merekrut ada 30 orang. Cara mengajaknya kita punya majalah, isinya bekerja rumahan juga. Jadi cara mengorganisirnya seperti itu, kita mendekati dulu kita kasih tau kita pekerja rumahan sama seperti ibunya juga, nah dari situ tertarik. Kita sampaikan tujuan-tujuan kita apa.” (Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

Dengan adanya aktivitas diskusi dan pembelajaran berbagai hal seperti gender, pentingnya sadar hukum, teknik lobi dan negosiasi di SPPR, anggota SPR Sejahtera kini memiliki keberanian untuk berbicara di depan publik maupun menjadi fasilitator dalam suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana dialami oleh Mia yang pada awalnya ketakutan ketika harus berbicara di depan forum.

“Kalau kesulitan [dalam proses belajar] itu pasti ada ya, kan kita ini kadang-kadang kurang percaya diri. Jumpa dinas itu kan kadang kita kurang percaya diri. Aduh, gemetar sih, karena pas awal saya masuk serikat ini, waktu pelatihan pertama itu saya pelatihan fasilitator. Jadi itu sempat gemetar juga sih di depan, tapi saya tetap mencoba juga. Terus saya mencoba terus, saya berani-beranian aja. Saya nggak pernah jadi pemimpin rapat, nggak pernah sama sekali. Tapi saya coba aja walaupun salah. Memberikan kata sambutan juga nggak pernah, tapi saya coba aja walaupun mungkin salah di mata orang lain, tapi saya lanjut aja nggak peduli. Jadi saya ucapkan saja apa yang mau saya ucapkan. Entah benar atau nggaknya saya ngomong, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya coba aja.” (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Hal yang serupa juga dialami oleh Asih yang kini menjabat sebagai Bendahara DPD SPR Sejahtera. Pelatihan yang diberikan oleh BITRA mengantarkan Asih menjadi fasilitator para perempuan pekerja rumahan. Melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan, Asih juga terlibat menjadi tim perumus Raperda Pekerja Rumahan.⁵⁴

“Kalau di Medan ini saya ikut juga bikin perumus. Kan kita ada pelatihan ada 25 orang. Dipilih jadi 10 orang. Dipilih lagi jadi enam orang.” (Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

Selain itu, serikat pekerja membawa dampak positif terhadap perempuan desa. *Pertama*, sejak ada serikat, “tim rumpi pohon mangga” sudah tidak ada lagi. Waktu yang selama ini dihabiskan ibu-ibu untuk berbincang di bawah pohon mangga dari pagi sampai sore, sekarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. *Kedua*, sekolah kapasitas mengajarkan teknik fasilitasi, keterampilan praktis, dll. Pengetahuan ini menjadikan perempuan lebih optimis untuk berwirausaha. Misalnya, mereka percaya diri untuk memasarkan produk mereka kepada anggota kelompok maupun lainnya. Linda dan Imah dari PKTD Sedotan juga membangun usaha kue bolu untuk mendapatkan tambahan penghasilan.⁵⁵

“Jadi makanya alhamdulillah ibu-ibu yang ikut SPR ini sejak ada sekolah kapasitas jadi lebih mandiri. Yang tadinya nggak berani jualan, termasuk saya, yang tadinya kebetulan suka aja buat-buat kue bolu, terakhir kami sama kakak ipar buat usaha pribadi lah.” (Linda, Ketua PKTD Sedotan, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019)

Setelah bergabung ke dalam SPR Sejahtera, kapasitas perempuan semakin meningkat sehingga membuat mereka lebih tangguh (*resilient*) dalam menghadapi situasi krisis. Misalnya saja, pada awal masa pandemi karena penyebaran virus Covid-19 bulan April 2020, perusahaan menghentikan produksinya dan merumahkan para pekerja rumahan. Alhasil, perempuan tidak lagi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

⁵³ Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

⁵⁴ Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019.

⁵⁵ Linda, Ketua PKTD Sedotan, desa penelitian di Deli Serdang, 10 November 2019.

keluarga. Untuk bertahan dalam situasi tersebut, anggota SPR berusaha untuk mandiri dengan cara mencari peluang ekonomi lain dengan memanfaatkan kapasitas yang telah mereka miliki.⁵⁶

Pertama, anggota SPR yang memiliki kemampuan menjahit menerima pesanan untuk pembuatan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker dari kain. Selama masa pandemi, anggota SPR yang tergabung dalam unit usaha pembuatan sprei untuk sementara beralih menjahit masker.⁵⁷ *Kedua*, pekerja rumahan membuat minuman tradisional seperti jamu herbal untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada masa pandemi ini, jamu herbal dipercaya dapat memperkuat daya tahan tubuh. Anggota SPR memiliki kemampuan membuat jamu herbal setelah mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan dalam program SPPR.⁵⁸

4.2. Perubahan di level Komunitas

Di level komunitas, kelompok pekerja rumahan saat ini memiliki posisi tawar yang lebih baik ketika berinteraksi dengan pemerintah desa. BITRA terus mendorong kelompok pekerja rumahan untuk aktif berkomunikasi dengan Pemdes, kendati Pemdes cenderung tidak melibatkan semua elemen warga untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan dan kegiatan di desa. Pengetahuan tentang lobi dan negosiasi langsung dipraktikkan oleh pekerja rumahan kepada pemerintah desa. Lambat laun, Pemdes menyadari kemampuan yang dimiliki oleh pekerja rumahan dan mulai memperhitungkan keberadaan mereka.⁵⁹ Pekerja rumahan mulai dilibatkan sebagai kader-kader di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Tetapi untuk kader-kader kita misalnya, kader-kader SPR itu sudah masuk menjadi kader-kader desa. Ada yang Kader PKK, ada yang KB, Posyandu, Kader Lansia. Jadi teman-teman SPR ini semua yang mendampingi desa. Karena menurut kepala desa pekerja rumah binaannya BITRA ini jauh lebih maju daripada ibu-ibu yang lain. Jadi itu sudah diambil semua untuk fokus ini, fokus itu. Nah bahkan pernah itu perlombaan tingkat kalau tidak salah untuk kader PKK pusat kreatif apa itu, itu punya kita yang menang.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019).

Hubungan antara SPR dan pemerintah desa pun mulai membaik dan bersifat saling membutuhkan. Sejak September 2019, SPR sudah terlibat di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan masuk ke dalam tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). SPR juga membantu pemerintah desa dalam pengurusan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pekerja rumahan dan masyarakat umum lain yang membutuhkan. Artinya, mereka berkontribusi membantu program desa.

“Kemarin itu kami dari pemerintah desa agak sulit mengusulkan BPJS kesehatan. Tapi melalui daripada ibu-ibu ini, kelompok ini, ya mudah-mudahan kami sebagian, ya udah banyaklah ya kan, itu sudah keluar.” (Alif, Kepala Desa, 7 November 2019)

Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan SPR dalam berbagai pelatihan seperti menjahit dan bordir, merangkai bunga, juga pelaksanaan tes IVA di Puskesmas. Peserta tes IVA ini dari beberapa dusun. Hal ini sejalan dengan program desa mengenai kesehatan reproduksi perempuan.

SPR terus berusaha berkomunikasi dengan desa, salah satunya untuk mengakses Dana Desa sejak tahun 2017. Namun, hasil komunikasi ini belum membawa hasil yang menjanjikan sampai sekarang. Usulan SPR terkait pengolahan ubi untuk pasokan ke perusahaan SMS juga belum ditindaklanjuti. Padahal, BITRA telah berupaya membawa akademisi dari Universitas Sumatera Utara untuk membuat penelitian terkait potensi pengolahan ubi.⁶⁰

⁵⁶ Wawancara Kartika, Direktur BITRA, 14 Juli 2020.

⁵⁷ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, 14 Juli 2020.

⁵⁸ Wawancara Kartika, Direktur BITRA, 14 Juli 2020.

⁵⁹ Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

⁶⁰ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 7 November 2019.

“Nah kemarin itu sudah coba tawarkan kepala desa itu mengatakan sebenarnya ada Dana Desa sekitar Rp160 juta yang disiapkan untuk BUMDes. Dia sebenarnya pengen pekerja rumahan ini yang kita bina itu masuk menjadi pengurus BUMDes. Tapi dia coba masih mau melakukan penelitian dulu sebelum buat BUMDesnya. Kira-kira usaha apa yang pas. Karena desa ini di sekitaran industri. Itu daerah industri. Dan kalau misalnya dibuat usaha kreatif, apa yang cocok buat ibu-ibu. Kemarin itu rencananya penelitian dulu. Jadi BITRA kemarin diminta menyiapkan orang misalnya yang bisa membantu desa untuk melakukan penelitian usaha apa yang pas untuk BUMDesnya. Nah kemarin kita tawarkan ada teman kita dari USU, akademisi untuk melakukan penelitian. Tapi kayaknya belum berlanjut.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019).

Kerjasama dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi di satu sisi dapat menjadi potensi yang bagus untuk kelompok pekerja rumahan, namun di sisi lain juga memunculkan kekhawatiran bagi pekerja rumahan. Mia dan Santi menceritakan kekhawatirannya jika usaha pengolahan ubi yang telah mereka rintis dengan susah payah akan diklaim sebagai usaha pemerintah desa.⁶¹

Pada 21 Januari 2020, pemerintah desa mulai melibatkan anggota SPR Sejahtera dalam musrenbang dan menjadi bagian dari tim perumus RPJMDes. Pemerintah Desa meminta SPR Sejahtera untuk memasukkan usulan program terkait pemberdayaan perempuan, kebutuhan pekerja rumahan dan mengusulkan jenis usaha untuk BUMDes. Pada saat itu, ada empat orang anggota SPR Sejahtera yang menjadi perwakilan untuk mengikuti musrenbang. Ada beberapa program yang diusulkan oleh SPR Sejahtera, di antaranya yaitu program pendidikan pemasaran usaha untuk pekerja rumahan, program pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pelatihan menjahit serta usulan bantuan dana dan peralatan usaha untuk unit usaha SPR Sejahtera (Maju Jaya Collection dan Melati Jaya).⁶²

4.3. Perubahan Institusional

Terdapat tiga perubahan institusional penting yang telah dicapai oleh SPR Sejahtera, di antaranya yaitu pencatatan SPR Sejahtera oleh Disnaker Provinsi Sumatera Utara, Pembuatan Raperda Pekerja Rumahan, dan keberhasilan mengakses program kesejahteraan yang diatur melalui Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Pencatatan SPR Sejahtera kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pekerja rumahan telah berhasil membentuk Serikat Pekerja dan mencatatkannya pada Disnaker Provinsi Sumatera Utara. Pencatatan Serikat Pekerja Rumahan oleh Disnaker merupakan salah satu perubahan penting yang didapatkan oleh SPR Sejahtera. Dengan adanya dokumen ini, maka pemerintah provinsi telah mengakui secara hukum keberadaan SPR Sejahtera di Sumatera Utara.

Untuk mencatatkan SPR Sejahtera, pekerja rumahan dan BITRA melalui upaya yang tidak mudah. BITRA melakukan pendekatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mencatatkan keberadaan SPR. Mereka secara intens datang ke Disnakertrans untuk bertemu dengan Tina, Staf Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara, untuk memperkenalkan BITRA dan membawa perhatian terhadap isu pekerja rumahan. Tujuan dari lobi adalah untuk mendapatkan pengakuan bagi Serikat Pekerja Rumahan. BITRA juga membawa serikat pekerja lain agar mendapatkan kepercayaan.

Upaya pendekatan secara terus menerus dengan cara terus memberikan informasi mengenai pekerja rumahan kepada Disnakertrans berhasil mencatatkan SPR sebagai serikat yang diakui secara resmi.⁶³ Pada tahun 2015, Disnakertrans mencatatkan SPR Sejahtera berdasarkan masing-masing sektor, misalnya sektor penganyam panggangan ikan, dll. Sedangkan pada tahun 2017, Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara memberikan tanda bukti pencatatan kepada Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera Provinsi Sumatera

⁶¹ Wawancara Mia dan Santi, PKTD Kawat SPR-Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 7 November 2019.

⁶² Rina, Program Manager BITRA, komunikasi melalui jaringan pribadi, 17 Juli 2020.

⁶³ Wawancara Diah, staf lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

Utara. Pencatatan ini menjadi percontohan di daerah lain seperti Yogyakarta dan Jawa Timur.⁶⁴ Pencatatan ini penting karena dapat menjadi titik awal untuk dapat mendorong jaminan hak pekerja rumahan secara jangka panjang, meski belum ada aturan di tingkat nasional.

Selain itu, pencatatan SPR oleh Disnakertrans menguatkan legalitas SPR sebagai Serikat Pekerja di Sumatera Utara, dan memudahkan SPR untuk melakukan lobi ke dinas pemerintah dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja rumahan. Dengan adanya legitimasi tersebut, maka pekerja rumahan dapat memiliki posisi tawar dengan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.⁶⁵ Legitimasi ini juga meningkatkan posisi tawar perempuan pekerja rumahan dengan pemerintah desa.

“Bagaimana mulai dari awal dulu mengorganisasi pekerja rumahan, sampai misalnya teman-teman pekerja rumahan bisa seperti sekarang, organisasinya sudah mulai kuat, mereka sudah bisa negosiasi dengan pengusaha, ada kenaikan upah, mereka sudah bisa diakui oleh pemerintah melalui pencatatan mereka di dinas tenaga kerja, mereka sudah dilibatkan oleh dinas tenaga kerja dengan berbagai kegiatan apa yang ada di dinas tenaga kerja, mereka sudah setara sekarang sedang serikat pekerja dan serikat buruh. Jadi kalau serikat pekerja serikat buruh itu diundang oleh Dinas Tenaga Kerja dalam hal kegiatan apapun yang berbau ketenagakerjaan, SPR itu sudah ikut, posisinya jadi sama.” (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019).

Bagi anggota SPR, bersatu dalam serikat juga membawa dampak yang sangat positif. Salah satunya yaitu mereka menjadi kompak dan tidak terpecah belah sebagaimana disampaikan oleh Mila:

“Ya lebih bagus berserikat-lah daripada tidak berserikat. Kalau berserikat itu bersatu, menyatu. Kalau nggak berserikat itu berpecah-pecah jadinya. Nggak ada kekompakannya.” (Mila, Wakil Ketua DPC SPR Sejahtera, 9 November 2019)

Terkait dengan pencatatan serikat, Bayu, staf divisi advokasi BITRA menjelaskan bahwa BITRA memiliki strategi yang berbeda dengan mitra MAMPU yang lain. BITRA bukan hanya membentuk kelompok, tetapi juga membentuk serikat pekerja. Yasanti misalnya lebih memilih membentuk kelembagaan di tingkat desa, sementara BITRA menargetkan membentuk Serikat Pekerja Rumahan nasional.⁶⁶ Artinya, target BITRA memiliki skala yang lebih luas.

Rancangan Peraturan Daerah Pekerja Rumahan

Regulasi masih menjadi masalah dasar pekerja rumahan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya payung hukum di tingkat nasional yang menjadi rujukan formal dalam penyusunan peraturan daerah.⁶⁷ Dalam kondisi ini, BITRA tetap mendorong adanya Perda Pekerja Rumahan di Provinsi Sumatera Utara. Bayu, Staf Advokasi BITRA, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah mulai disusun sejak tahun 2015. Ide pembuatan raperda berdasarkan pemetaan kebutuhan pada saat diskusi antara BITRA dan serikat pekerja. Pada akhir 2016, SPR Sejahtera sudah memiliki draf raperda, dengan pintu masuk yaitu Disnaker dan legislatif.

Draf raperda disusun oleh tim perumus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Rumahan (AMPPR). Aliansi ini terdiri dari BITRA, SPR-Sejahtera, beberapa serikat pekerja di Sumatera Utara, LSM, akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan praktisi hukum, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara. Serikat pekerja yang bergabung yaitu Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Buruh Medan Independen (SBMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI), Serikat Pekerja Metal (SPMI). Keterlibatan serikat buruh lain menjadi strategi bagi SPR Sejahtera untuk membantu memengaruhi pemerintah. Di sinilah kontribusi faktor sejarah gerakan buruh yang kuat di Sumatera Utara, yang telah digali di bagian sebelumnya, menjadi faktor penunjang bagi agenda jaminan hak pekerja rumahan yang didorong oleh BITRA.

⁶⁴ Wawancara Diah, staf lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

⁶⁵ Wawancara Bayu, divisi advokasi BITRA, Deli Serdang, 11 November 2019.

⁶⁶ Wawancara Bayu, divisi advokasi BITRA, Deli Serdang, 11 November 2019.

⁶⁷ Wawancara Tina, Disnaker Provinsi Sumatera Utara, 6 November 2019.

Dalam proses penyusunan raperda ini, SPR Sejahtera menghadapi tantangan terkait dua hal. *Pertama*, sebagaimana disebut di atas, tidak adanya payung hukum di tingkat nasional yang mengatur tentang pekerja rumahan. Oleh karena itu, Draft Raperda Pekerja Rumahan di tingkat provinsi mengalami perubahan judul menjadi Draft Raperda Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, pasal-pasal di dalam Raperda Ketenagakerjaan tetap memuat tentang pekerja rumahan. *Kedua*, tantangan dalam pengusulan raperda yaitu adanya pergantian alat kelengkapan DPR pasca Pemilu 2019, khususnya pergantian Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Strategi yang dilakukan oleh BITRA yaitu merangkul komisi-komisi dan tetap menjaga isu pekerja rumahan dalam Raperda.

SPR terlibat aktif dalam pembuatan draft raperda. Anggota SPR memberikan masukan terkait dengan pengalaman mereka sebagai pekerja rumahan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dan kebutuhan akan perlindungan kerja.

“Jadi itu tadi perlunya Raperda, agar kita mendapatkan hak pekerja. Karena kerjanya seperti ini, menggunakan alat kerja yang tajam dan berisiko kena tangan. Jadi kita sekarang mengurus Ranperda untuk perlindungan dan payung hukum, dan mendapatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).” (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Menurut Kartika, Direktur BITRA, upaya mendorong pekerja rumahan untuk aktif mengadvokasi raperda juga tidak mudah. Oleh karena itu, BITRA terus menguatkan pekerja rumahan untuk berani datang dan berpendapat dalam dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD.⁶⁸ Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera menceritakan bagaimana proses penyusunan raperda tidak mudah untuk dilakukan karena adanya tarik ulur di level pemerintah:

“Itu kan udah ditarik ulur tarik ulur dari tiga tahun dari 2016. Sampai empat kali ganti Ketua Komisi E. Masih tetap diperjuangkan. Tidak luput dari bantuan serikat pekerja serikat buruh yang ada di Medan, NGO, LBH, dari PEKA juga. Mereka mendukung aja. Kalau yang ikut menggodok itu serikat pekerja serikat buruh saja.” (Asih, Bendahara DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

Setelah Raperda direvisi menjadi Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan diusulkan oleh Komisi E untuk diparipurnakan, pada tahun 2017, raperda naik sebagai perda usulan DPRD Provinsi. DPRD kemudian melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari pekerja rumahan di daerah lain. Pemilihan daerah melibatkan BITRA dan SPR. Pada bulan Maret 2017, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara pergi ke Surabaya dan Bandung, setelah sebelumnya ke Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan ILO. Dalam kunjungan kerja ini, BITRA ikut berpartisipasi dalam forum. Ketika itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa jika ada kebutuhan raperda, maka provinsi dipersilahkan untuk melanjutkan.⁶⁹ Dari kunjungan ini, staf Divisi Advokasi BITRA, melihat bahwa raperda tidak ada halangan. Karena adanya kebutuhan naskah akademik, maka DPR meminta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk menyusun draft naskah akademik.

Salah seorang anggota SPR Sejahtera yang terlibat aktif di dalam proses ini adalah Mia. Ia pernah terlibat dalam diskusi dengan akademisi dari Universitas Sumatera Utara untuk menyusun naskah akademik mengenai status pekerja rumahan dalam peraturan daerah. Mia terlibat dalam audiensi dan revisi mengenai rancangan peraturan daerah bersama SPR, BITRA, dan pemerintah. Lebih membanggakan lagi, Mia pernah turut audiensi bersama Kementerian Ketenagakerjaan mengenai Permennaker. Tidak sebatas itu, Mia mengatakan bahwa ia selalu siap apabila diminta untuk membagikan pengalamannya dalam organisasi di muka umum.

“[Ketika ditanya takut apa tidak] nggak lah, orang sama-sama makan nasi kok. Jadi prinsipnya seperti itu. Sering Bu Rina itu bilang, ‘ini kan ketua DPC nih, sama aja kayak Bupati nih jabatannya. Kalau di Pemerintahan Bupati,

⁶⁸ Berdasarkan diskusi kelompok dengan staf-staf BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

⁶⁹ Wawancara Bayu, Staf Divisi Advokasi BITRA, Deli Serdang, 11 November 2019.

kalau di serikat ini kan Ketua DPC, sama itu.' Jadi dalam pikiran kita, ya sama dong, kenapa sih kita mesti ada perbedaan derajat." (Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD Provinsi Sumatera pada September 2019, BITRA dan AMPPR terus mendorong pengesahan Raperda Ketenagakerjaan. Pada bulan Juni-Agustus 2019 dilakukan sidang paripurna, pandangan fraksi, tanggapan gubernur, dan sebagainya. Pada bulan Agustus 2019, DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah menyepakati raperda dan hasil kesepakatan tersebut diserahkan ke gubernur. Gubernur pun menyepakati dan mengusulkan ke Kemendagri pada 29 Agustus 2019 untuk proses fasilitasi. Untuk memperlancar prosesnya, BITRA melobi ke Dirjen Produk Hukum. Hasil fasilitasi keluar pada 20 September 2019 dengan hasil yang ternyata mengecewakan. Setelah menerima dokumennya pada bulan Oktober 2019, mereka mengetahui bahwa pasal-pasal yang terkait dengan pekerja rumahan tidak diterima.

Staf Disnaker Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa Disnaker Provinsi dan BITRA sebenarnya sudah berjuang untuk membuat rancangan Perda dengan melibatkan serikat pekerja rumahan. Namun, tiba-tiba sebelum raperda tersebut ketok palu, entah mengapa sebutan pekerja rumahan diganti menjadi pekerja mandiri.⁷⁰ Definisi pekerja mandiri dan pekerja rumahan pun berbeda. Pekerja mandiri dapat diartikan sebagai tukang bakso, atau usaha kecil lainnya, berbeda dengan pekerja rumahan. Rapat dilakukan berkali-kali di aula Disnaker, meskipun tidak banyak staf Disnaker berkontribusi dalam penyusunan raperda.⁷¹

Meskipun Raperda Pekerja Rumahan belum berhasil disahkan, BITRA, SPR dan Koalisi Buruh telah berhasil memengaruhi pemerintah untuk mendorong raperda. Namun, inisiatif daerah tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat karena tidak ada payung hukum yang menaungi pekerja rumahan. Oleh karena itu, Bayu, melihat bahwa pekerja rumahan harus menjadi isu nasional:

"Harus dijadikan agenda nasional, ini kalau kita mau bicara tentang kebijakan, advokasi kebijakan itu ya kaya begini. Bagaimana inisiatif-inisiatif di daerah itu harus berhenti ditengah jalan akibat dari cara pandang itu. cara pandang hukum kita itu terlalu teknokratis itu. Bagi kami bekerja sebagai pengusul itu sebuah frustrasi." (Bayu, Divisi Advokasi BITRA, desa penelitian di Deli Serdang, 11 November 2019).

Mengakses Kebijakan: Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Program Perlindungan Sosial

Untuk mendekati pekerja rumahan pada hak-haknya, BITRA melakukan advokasi ke dinas pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Beberapa dinas yang dituju oleh BITRA di antaranya yaitu Disnaker, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya, BITRA menghadapi kesulitan ketika menjalin koordinasi dengan dinas pemerintah karena adanya persepsi bahwa LSM di Medan hanya mencari uang dan mengada-ada dengan data masyarakat.⁷² Beberapa dinas yang sulit diajak bekerjasama yaitu BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

"Iya, dari kita sama teman-teman pekerja rumahan terus, ditolak awal datang lagi, tolak, datang lagi, bila perlu lobi-lobi warung, bila perlu pakai marga, kalau orang Batak kan marga ini kan [penting]." (Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Ketika pendekatan formal tidak berhasil dilakukan, BITRA dan SPR-Sejahtera menggunakan pendekatan informal berupa lobi-lobi di warung makan maupun menggunakan pendekatan marga, termasuk untuk melakukan lobi pada Dinsos Deli Serdang.

"Yang di Deli Serdang juga begitu, Deli Serdang juga awalnya sulit, pendekatannya juga melalui hubungan marga. Saat itu Kabidnya itu marga Harahap, suami saya marga Harahap. Kubawa suamiku ke situ. Kau ngomong dulu itu

⁷⁰ Wawancara Tina, Disnaker Provinsi Sumatera Utara, 6 November 2019.

⁷¹ Wawancara Tina, Disnaker Provinsi Sumatera Utara, 6 November 2019.

⁷² Berdasarkan diskusi kelompok dengan staf-staf BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

abang kau itu, kubilang ke dia. Akhirnya mulailah UMK. Kalau dulu di Langkat, Langkat agak lebih aware dulu.”
(Rina, Program Manager BITRA, 5 November 2019)

Pendekatan personal dan kultural ini berhasil membuka komunikasi antara BITRA dengan Dinas Sosial di Deli Serdang. Tidak lama setelah terbukanya pintu komunikasi, terjadi ketegangan antara BITRA dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. BITRA pada awalnya kesulitan untuk masuk ke Dinsos, karena waktu itu di Dinsos sedang ada kasus yang menyebabkan mereka mengalami krisis kepercayaan pada masyarakat.⁷³ Miskomunikasi terjadi karena BITRA terus mendesak Dinsos sementara Dinsos masih harus memverifikasi keberadaan dan kebenaran data mengenai pekerja rumahan. Ketika BITRA akhirnya mengalah dan mengerti proses yang harus dilakukan oleh Dinsos, ketegangan tersebut mencair dan BITRA pun diajak untuk berdiskusi mengenai ajuan bantuan untuk 480 orang pekerja rumahan. Bagi Dinas Sosial Deli Serdang, pekerja rumahan termasuk dalam wanita rawan sosial ekonomi. Penggolongan ini berdasarkan upah dan risiko yang diterima oleh para pekerja rumahan. Artinya, isu pekerja rumahan bersifat lintas dinas, dan didefinisikan secara berbeda-beda, sebagaimana yang dituturkan oleh Gani dari Dinsos Deli Serdang:

“Kroscek data, jadi mereka kemarin itu kan ngotot ini diproses Pak, tapi saya minta disupervisi. Pak ini udah miskin loh pak, gini, gini, gini, pekerja rumah ini bawa surat gini, gini, gini. Kita supervisi dulu. Mereka mengalah, mau supervisi. Di situlah mencairnya, kita supervisi ternyata betul miskin, baru kita usulkan.” (Gani, Dinas Sosial Deli Serdang, 6 November 2019)

Setelah melalui proses verifikasi, 99% pekerja rumahan yang diajukan menerima bantuan. Salah satu bantuan untuk pekerja rumahan yang difasilitasi oleh Dinsos adalah BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam mengakses PBI (Penerima Bantuan Iuran), yakni peserta asuransi yang preminya dibayarkan pemerintah. Proses yang dijalankan berupa masyarakat/perseorangan melalui PBI mendaftar melalui Dinsos, lalu kemudian diproses untuk dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) sesuai dengan Kartu Keluarga untuk diverifikasi yang menjadi syarat administrasi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi indikator verifikasi dari Dinas Sosial.⁷⁴ Menurut Diah, Staf Lapangan BITRA, keberhasilan BITRA mengakses program kesejahteraan karena BITRA dengan gigih menindaklanjuti usulan data yang telah mereka ajukan ke Dinas Sosial pada 2017. BITRA terus menanyakan pada staf dinas untuk mengetahui apakah usulan mereka sudah diproses.⁷⁵

Kerjasama antara Dinas Sosial dan BITRA terus berlanjut sampai sekarang. Misalnya, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang juga melibatkan BITRA sebagai mitra untuk merancang Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018 mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Rancangan dari Perbup Kabupaten Deli Serdang tentang SLRT ini dimulai sejak tahun 2017. Anggota SPR, dengan didampingi oleh BITRA, juga terlibat dalam perumusan Perbup ini. SLRT merupakan program dari Kementerian Sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini menggunakan mekanisme layanan satu pintu untuk penanganan kemiskinan dan Perlindungan sosial, serta mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu (medaninside.com, 2019). Deli Serdang menjadi salah satu kabupaten *pilot project* mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Sumatera Utara .

Adapun APBD untuk realisasi Perbup ini sebesar Rp600 juta. Perbup tersebut menyebutkan dalam pasal 12 ayat 3 bahwa Serikat Pekerja Rumahan masuk ke dalam struktur Tim Pelaksana Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di bidang data, informasi dan rujukan, yang diambil dari unsur masyarakat. Selain dari Serikat Pekerja Rumahan (SPR), bidang ini berasal dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di desa, seperti pendamping korban, paralegal, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Layanan Berbasis Komunitas (LBK), Kelompok Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Serikat

⁷³ Wawancara Gani, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, 8 November 2019.

⁷⁴ Wawancara Gani, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, 8 November 2019.

⁷⁵ Wawancara Diah, Staf Lapangan BITRA, Deli Serdang, 9 November 2019.

Perempuan Independen (SPI), dan PKK. Bidang ini dibentuk dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Selain dengan Dinsos Kabupaten Deli Serdang, BITRA juga menjalin kerjasama dengan dinas lain. Dengan Disnaker Kabupaten Deli Serdang, BITRA berhasil memfasilitasi SPR Sejahtera untuk mendapatkan akses program pelatihan-pelatihan dan bantuan usaha. Sedangkan dengan Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang, SPR sudah mendapatkan surat izin usaha untuk unit usaha SPR, yaitu usaha pembuatan spreng dan keripik pisang.⁷⁶

BITRA juga bekerjasama dengan DP3A, BITRA sering kali mengundang dinas ini untuk mengangkat isu pekerja rumahan. DP3A sendiri berusaha mengakomodasi usulan dari BITRA untuk isu pekerja rumahan. Meskipun tidak memiliki program spesifik untuk pekerja rumahan, DP3A berusaha melibatkan pekerja rumahan ketika mengadakan pelatihan maupun pendampingan teknis. Tidak adanya program khusus untuk pekerja rumahan lebih terkait dengan tupoksi lembaga.⁷⁷ Selain itu, melalui Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) BITRA dapat langsung menghubungkan ke DP3A untuk ikut menangani persoalan perempuan dan anak, termasuk untuk kasus pekerja rumahan.⁷⁸

Terkait relasi dengan gubernur, SPR Sejahtera sudah mendapatkan pengakuan dan disetarakan dengan serikat pekerja yang lain.⁷⁹ Gubernur pun berinisiatif untuk memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama CSR dengan Bank Sumatera Utara untuk lebih dari 1.700 orang pekerja rumahan.⁸⁰

“Jadi itu kemarin ada CSR dari Bank Sumut untuk pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja rumahan dimasukkan ke dalam salah satu pekerja itu. Jadi kemarin ada free iuran selama 3 bulan. Bank Sumut yang langsung bayar ke BPJS, lalu bank Sumutnya menyerahkan ke pekerja rumah.” (Nita, Staf BITRA, 5 November 2019)

Dengan adanya bantuan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rumahan merasa mendapat perhatian dan perlindungan kendati mereka harus membayar iuran secara mandiri di bulan keempat dan seterusnya.⁸¹

“Iya, dapat kartunya. Dikasih BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan, setelahnya bayar sendiri, Rp16.800,00. Cuma, sistem BPJS Ketenagakerjaan ini dia tidak berdana. Seandainya kita tidak mampu, putus. Dan seandainya kita nanti ada uang, masuk lagi tidak ada masalah sama mereka. Kerja menganyam kawat juga berisiko. Kecucuk tangannya, tergores-gores. Ini memang risikonya besar sih.” (Mia, Sekretaris SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Penutup

Perempuan pekerja rumahan merupakan kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara. Meskipun berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi, perempuan pekerja rumahan belum mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, baik dari sisi upah yang layak, jaminan sosial maupun keselamatan kerja. Bahkan, perempuan pekerja rumahan justru ikut menanggung biaya dari perusahaan, misalnya menyediakan peralatan kerja secara mandiri, tempat kerja, listrik dan menanggung limbah perusahaan. Berbagai persoalan inilah yang mendorong perempuan pekerja rumahan membangun gerakan kolektif melalui Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera dengan dukungan dari BITRA, serikat buruh di Sumatera Utara, akademisi dan organisasi masyarakat lain.

Berbagai perubahan telah dicapai oleh SPR Sejahtera. Di level individu, perempuan yang bergabung dalam SPR Sejahtera telah menyadari posisinya sebagai pekerja rumahan dan hak-hak pekerja rumahan, mengalami peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan berbicara di depan publik. Di tingkat komunitas, pekerja

⁷⁶ Wawancara Rina, Program Manager BITRA, Deli Serdang, 7 November 2019.

⁷⁷ Wawancara Ruslam, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, 7 November 2019.

⁷⁸ Wawancara Ruslam, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, 7 November 2019.

⁷⁹ Berdasarkan diskusi kelompok dengan staf-staf BITRA, Deli Serdang, 5 November 2019.

⁸⁰ Disampaikan Rina, Program Manager BITRA, 7 November 2019; Wawancara Ruslam, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, 7 November 2019.

⁸¹ Wawancara Mia, Sekretaris DPD SPR Sejahtera, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019.

rumahan telah membangun interaksi dan jaringan yang cukup bagus dengan pemerintah desa, yang membuka pintu bagi mereka untuk terlibat dalam proses-proses pembuatan keputusan di desa, seperti musrenbangdes dan penyusunan RPJMDes. Interaksi kuat juga terbangun karena SPR membantu pemerintah desa dalam pengurusan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pekerja rumahan dan masyarakat umum lain yang membutuhkan.

Di level institusional, SPR Sejahtera telah berhasil mencatatkan organisasi ini secara resmi di Disnaker Sumatera Utara. Pencatatan ini penting sebagai bentuk pengakuan Disnaker akan keberadaan SPR Sejahtera, dan untuk memperkuat legitimasi di hadapan pemerintah desa. Selain itu, pekerja rumahan juga berhasil mengakses program perlindungan sosial dari pemerintah dan menjadi bagian dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sesuai Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018 mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Terakhir, pekerja rumahan berupaya mendorong pengesahan Raperda tentang pekerja rumahan. Proses mendorong raperda ini masih menghadapi berbagai persoalan, dan sampai sekarang belum berhasil diterbitkan. SPR Sejahtera menyiasatinya dengan mengganti judul Raperda Pekerja Rumahan menjadi Raperda Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertahankan pasal-pasal yang mengatur perlindungan pekerja rumahan. Pada akhirnya, pasal-pasal tentang pekerja rumahan tidak diperbolehkan masuk dalam Raperda Ketenagakerjaan berdasarkan hasil fasilitasi Raperda oleh Kementerian Dalam Negeri pada September 2019. Sampai saat ini, SPR Sejahtera, BITRA dan Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja Rumahan (AMPPR) terus berusaha mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang melindungi pekerja rumahan.

Bibliografi

- Allen, E. dkk., 2014. Pekerjaan Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten dalam *Laporan Hasil Riset ILO MAMPU-Akses ke Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang Layak untuk Perempuan*.
- Hadiz, V.R., 1998. *Reformasi Total?: Labor After Suharto*, Ithaca, Cornell University Press.
- ILO, 1996. K177 – Konvensi Kerja Rumahan, 1996 (No. 177), diakses 5 Februari 2020: <
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145822.pdf>.
- Medan Bisnis Daily, 2014. Warga Tanjung Morawa Resah Akibat Serangan Lalat, diakses 5 Februari 2020: <
http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/08/13/111237/warga_tanjungmorawa_resah_akaibat_serangan_lalat/>.
- Medan Inside, 2019. Penerapan SLRT di Sumut Masih Rendah, diakses 5 Februari 2020: <
<https://medaninside.com/penerapan-slrt-di-sumut-masih-rendah/>>.
- Panggabean, T. 2009. *Gerakan Serikat Buruh di Medan 1971-1990*, Medan, Universitas Sumatera Utaran.
- Parapat, A.A., 2016. *Sejarah Gerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Kota Medan Tahun 1992-2012*, Medan, Universitas Negeri Medan.
- Pemerintah Desa, 2019. *Laporan Profil Desa, Desa Penelitian, Kabupaten Deli Serdang*.